

ABSTRAK

“pelaksanaan mutasi jabatan oleh bupati kepulauan sula ditinjau dari undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : bagaimanakah pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap pegawai aparatur sipil negara dan ketentuan yang di atur dalam undang-undang. Jenis penelitian yang digunakan normatif empiris. Informan dalam penelitian ini adalah sekertaris dan kajian pustaka. Teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah wawancara. Sedangkan teknik analisis data meliputi penyajian data dan buku literatur hukum yang sesuai dengan objek penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa aspek pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh bupati sula terhadap pegawai ASN di anggap cacat secara procedural. Sebab bupati sula telah melanggar beberapa ketentuan undang-undang di antaranya yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, dan bupati sula juga tidak menginformasikan kepada badan kepegawaian nasional maupun badan kepegawaian dan kepangkatan

ABSTRACT

"The implementation of the transfer of office by the Regent of the Sula Islands is reviewed from Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections". The purpose of this study is to find out: how is the implementation of mutations carried out by regional heads against state civil servants and the provisions stipulated in the law. The type of research used is normative empirical. Informants in this study were secretary and literature review. The technique used by the author to collect data is interviews. While data analysis techniques include data presentation and legal literature books that are in accordance with the object of research

The results of this study indicate that from several aspects of the implementation of mutations carried out by the Regent of Sulah towards ASN employees, it is considered procedurally defective. This is because the Regent of Sulah has violated several provisions of the law, including Law No. 5 of 2014 concerning ASN, Law No. 10 of 2016 concerning the election of regional heads, and the Regent of Sulah has also not informed the National Civil Service Agency or the Civil Service Agency and Ranks.